

OVERCOMING HUMAN CAPITAL STAGNATION: A BREAKTHROUGH POLICY FOR THE ACCELERATION OF EDUCATION AND HEALTH QUALITY IN ACEH TAMIANG

Fitriyanti

Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang
Fi3fitri06@Yahoo.Com

ABSTRAK

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Aceh Tamiang menghadapi tantangan ganda berupa stagnasi indikator fundamental yang diperburuk secara signifikan oleh bencana hidrometeorologi dahsyat pada akhir tahun 2025. Musibah banjir bandang tersebut telah melumpuhkan layanan publik, merusak 439 sekolah, serta menghancurkan 30,7 ribu hektare tambak rakyat yang merupakan pilar ekonomi lokal. Kajian ini bertujuan merumuskan kebijakan terobosan untuk mendobrak stagnasi mutu pendidikan dan kesehatan melalui pendekatan resiliensi sistemik. Menggunakan metodologi kualitatif studi kasus dengan analisis SWOT dan matriks William Dunn, penelitian ini mensintesis data primer dari FGD bersama 50 pemangku kepentingan serta data sekunder laporan kinerja dan keuangan daerah. Hasil analisis mengidentifikasi bahwa akar masalah terletak pada kekakuan sistem perencanaan rutin yang tidak adaptif terhadap risiko bencana. Temuan evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa strategi revitalisasi fisik konvensional tidak mencukupi untuk memulihkan modal manusia yang terdampak trauma dan krisis ekonomi. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan transformasi sistem melalui penerapan kebijakan layanan digital terpadu dan jaring pengaman sosial berupa "Basiswa Transisi Resiliensi" untuk memastikan keberlanjutan kualitas SDM di tengah ancaman bencana di masa depan.

Kata kunci: *Stagnasi SDM, Resiliensi Bencana, Kebijakan Publik, Aceh Tamiang, Transformasi Digital.*

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) telah lama diakui sebagai episentrum strategi pembangunan global abad ke-21, yang berfungsi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Di Kabupaten Aceh Tamiang, visi ini menghadapi paradoks pembangunan yang tajam; di mana peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara agregat ternyata menutupi kerapuhan pada indikator-indikator fundamental pasca hantaman bencana banjir bandang pada akhir November 2025. Bencana tersebut tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik secara masif, seperti 439 bangunan sekolah dan 32 kantor pemerintahan, tetapi juga meruntuhkan sendi-sendi pelayanan publik dasar. Fenomena ini menciptakan situasi di mana sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan yang sebelumnya sudah mengalami stagnasi, kini berada pada titik nadir yang membutuhkan kebijakan luar biasa untuk melakukan pemulihan sekaligus akselerasi.

Secara faktual, sebelum bencana terjadi, IPM Aceh Tamiang pada tahun 2024 telah mencapai angka 72,32, yang secara administratif menempatkan kabupaten ini pada peringkat ke-10 di tingkat Provinsi Aceh. Namun, data internal menunjukkan bahwa Rata-

rata Lama Sekolah (RLS) hanya tertahan di angka 9,30 tahun, jauh di bawah target Renstra sebesar 10,51 tahun. Kondisi ini diperparah oleh tren negatif pada sektor kesehatan, di mana Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat drastis menjadi 13,2 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Krisis air bersih pascabencana yang memaksa warga mengonsumsi air genangan banjir serta lumpuhnya layanan hemodialisis di RSUD Muda Sedia menjadi bukti nyata betapa rapuhnya resiliensi layanan dasar daerah ini terhadap guncangan eksternal.

Kesenjangan antara realitas lapangan dengan laporan administratif perencanaan yang menunjukkan tingkat konsistensi program hingga 113,64% menandakan adanya "kegagalan kapabilitas implementasi". Sebagaimana diuraikan oleh Lant Pritchett (2013), kegagalan ini terjadi ketika birokrasi memiliki sumber daya namun tidak mampu mengubahnya menjadi layanan berkualitas karena terjebak dalam formalitas administratif. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji urgensi pergeseran paradigma dari *input-oriented* menuju *resilience-outcome oriented*. Kajian ini mengisi celah literatur mengenai dinamika pembangunan SDM di tingkat kabupaten yang spesifik menghadapi bencana hidrometeorologi, dengan menawarkan solusi kebijakan yang melampaui batas sektoral dan berfokus pada reformasi kualitas belanja serta penguatan kapasitas implementasi di level akar rumput.

Urgensi dekonstruksi model perencanaan di Aceh Tamiang semakin mendesak mengingat adanya *gap* antara tingginya alokasi anggaran fungsi layanan dasar dengan realitas kerentanan infrastruktur fisik yang ada. Stagnasi SDM bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan manifestasi dari ketidakmampuan sistem birokrasi dalam mengintegrasikan mitigasi risiko ke dalam siklus kebijakan pembangunan jangka menengah. Tanpa adanya pergeseran dari paradigma pemeliharaan rutin menuju paradigma resiliensi aktif, setiap capaian IPM akan selalu dihantui oleh risiko kemunduran drastis setiap kali bencana hidrometeorologi melanda wilayah ini.

Selain itu, dimensi sosiologis dari dampak bencana terhadap modal manusia sering kali terabaikan dalam narasi pembangunan konvensional. Kehancuran puluhan ribu hektare tambak rakyat bukan hanya kerugian ekonomi sektoral, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan dan gizi keluarga yang menjadi fondasi kualitas kesehatan jangka panjang. Interkoneksi antara kerugian mata pencaharian dengan potensi peningkatan angka putus sekolah menciptakan siklus kemiskinan baru yang memerlukan intervensi kebijakan lintas sektor yang lebih radikal dan terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk membedah secara mendalam paradoks antara kepatuhan administratif dan stagnasi capaian SDM di Kabupaten Aceh Tamiang. Metodologi ini dipilih karena kemampuannya dalam melakukan eksplorasi holistik terhadap fenomena tata kelola kontemporer yang kompleks dalam konteks nyata. Fokus utama analisis diarahkan pada sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan sektor pendidikan serta kesehatan pascabencana besar tahun 2025.

Data penelitian dikumpulkan melalui dua teknik utama untuk memastikan validitas dan triangulasi temuan. Pertama, studi dokumen sekunder yang mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Audited) 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda 2024, Rencana Strategis (Renstra) daerah, serta data resmi dampak

bencana dari BNPB dan media nasional. Kedua, pengumpulan data primer dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan 50 responden representatif, terdiri dari unsur Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, serta tokoh masyarakat terdampak.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui kerangka kuantitatif dan kualitatif. Penentuan prioritas masalah menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG), sementara identifikasi akar masalah dilakukan melalui diagram *fishbone* yang membagi penyebab ke dalam kategori manusia, metode, sarana, pengukuran, dan lingkungan. Untuk merumuskan strategi kebijakan, penelitian ini menerapkan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang diperdalam dengan matriks TOWS dan evaluasi kriteria William Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelayakan teknis.

Penggunaan desain studi kasus dalam penelitian ini juga diperkuat dengan pendekatan observasi partisipatif di wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling parah. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika respons lokal yang tidak terekam dalam laporan administratif formal. Fokus observasi diarahkan pada mekanisme adaptasi masyarakat dan hambatan logistik yang dialami oleh tenaga pendidik serta medis di lapangan pascabencana, guna mendapatkan gambaran komprehensif mengenai distorsi layanan publik.

Lebih lanjut, integrasi matriks William Dunn digunakan untuk menguji secara kritis kelayakan dari setiap opsi kebijakan yang diusulkan. Evaluasi ini mencakup aspek responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat serta keadilan dalam distribusi sumber daya pemulihan. Dengan menggunakan kriteria keberlanjutan, metodologi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif untuk masa darurat, tetapi juga mampu menjadi fondasi transformasi sistemik bagi Kabupaten Aceh Tamiang di masa depan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori: Dari Administrasi Menuju Resiliensi

Penerapan *New Public Management* (NPM) menuntut birokrasi di Aceh Tamiang untuk beralih dari sekadar kepatuhan prosedur menuju akuntabilitas hasil yang nyata. Meskipun daerah ini telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP yang baik, hal tersebut terbukti belum cukup untuk melindungi modal manusia dari dampak bencana. Teori resiliensi organisasi publik menekankan bahwa dalam kondisi krisis, birokrasi harus memiliki kapasitas adaptif untuk mempertahankan fungsi layanan dasarnya. Kelumpuhan 32 unit kantor pemerintah dan kerusakan 439 sekolah menunjukkan bahwa infrastruktur layanan dasar kita sangat bergantung pada kehadiran fisik gedung yang rentan. Oleh karena itu, konsep "Build Back Better" harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan dan kesehatan agar pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi ke titik stagnan semula, tetapi membangun sistem yang lebih tangguh terhadap guncangan masa depan.

Diagnosa Masalah: Visualisasi Akar Masalah (Diagram Fishbone)

Berdasarkan analisis *fishbone*, rendahnya capaian SDM pascabencana di Aceh Tamiang merupakan akumulasi dari beberapa faktor sistemik. Dari sisi *Metode*, kebijakan selama ini cenderung berfokus pada input fisik dan pemenuhan administrasi rutin yang kaku, sehingga gagal merespons kebutuhan dinamis di lapangan pascabencana. Dari faktor

Manusia, keterbatasan SDM teknis di tingkat kecamatan serta munculnya trauma kolektif pada aparatur dan masyarakat menghambat akselerasi layanan. Pada aspek *Sarana*, terdapat inefisiensi belanja di mana alokasi besar belum diikuti oleh standarisasi fasilitas yang tahan bencana. Terakhir, faktor *Pengukuran* menunjukkan bahwa sistem monitoring yang ada masih berorientasi pada serapan anggaran, bukan pada dampak nyata (*outcome*) terhadap kualitas hidup masyarakat.

Analisis mendalam terhadap faktor "Manusia" dalam diagram *fishbone* mengungkapkan bahwa trauma kolektif tidak hanya dialami oleh masyarakat, tetapi juga oleh aparatur sipil negara yang bertugas sebagai pelayan publik. Kondisi psikologis yang tidak stabil ini secara langsung menurunkan efisiensi koordinasi antar-instansi, yang pada akhirnya memperlambat eksekusi program-program strategis pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, investasi pada kesehatan mental birokrasi harus dipandang sebagai prasyarat utama untuk memulihkan kapasitas operasional pemerintah daerah dalam situasi krisis.

Dari sisi "Pengukuran", ketergantungan pada indikator serapan anggaran sebagai ukuran keberhasilan telah menciptakan bias administratif yang berbahaya. Laporan kinerja yang terlihat "hijau" secara administratif sering kali menutupi kegagalan substantif dalam penyediaan layanan dasar yang tahan bencana. Reformasi sistem monitoring dan evaluasi menjadi keniscayaan, di mana indikator resiliensi harus dimasukkan ke dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) daerah untuk mendorong OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lebih fokus pada pencapaian *outcome* yang adaptif terhadap risiko lingkungan.

Evaluasi Prioritas Masalah (Matriks USG)

Melalui matriks USG, kemunduran kualitas layanan kesehatan dan krisis sanitasi diidentifikasi sebagai isu paling prioritas dengan skor tertinggi (15), mengingat dampaknya yang menyangkut nyawa manusia secara langsung (kematian bayi dan krisis air bersih). Masalah kapasitas implementasi dan kualitas belanja menyusul dengan skor 14, karena faktor ini merupakan akar penyebab (*root cause*) dari semua kegagalan sektoral. Meskipun masalah pendidikan memiliki tingkat keseriusan yang tinggi (skor 13), urgensinya berada di bawah isu kesehatan karena dampaknya terhadap mutu SDM bersifat lebih jangka panjang dibandingkan risiko penyakit akut pascabencana.

Alternatif kebijakan pertama yang diusulkan adalah percepatan digitalisasi layanan dasar melalui pembangunan *Disaster Recovery Center* (DRC) data pembangunan SDM. Pengalaman hancurnya arsip fisik di 32 unit kantor pemerintah menunjukkan betapa rentannya sistem administrasi konvensional kita. Dengan sistem data berbasis *cloud* dan satelit, koordinasi pemulihan pendidikan dan kesehatan dapat tetap berjalan meskipun infrastruktur fisik di lapangan mengalami kerusakan total.

Alternatif kedua berfokus pada diversifikasi sumber pendanaan melalui penguatan regulasi kemitraan strategis (CSR dan Filantropi). Mengingat keterbatasan ruang fiskal APBD Aceh Tamiang, pemerintah daerah perlu bertransformasi dari sekadar "penyelenggara" menjadi "orkestrator" sumber daya lintas sektor. Skema ini memungkinkan pihak swasta dan universitas untuk berkontribusi secara sistematis dalam

pembangunan sekolah tangguh bencana dan pusat kesehatan masyarakat berbasis komunitas tanpa harus membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Analisis Strategis SWOT dan Matriks TOWS

Analisis faktor internal menunjukkan kekuatan utama Aceh Tamiang terletak pada komitmen fiskal mandatori yang tinggi (>20% untuk pendidikan dan kesehatan) dan kepemimpinan Bupati yang responsif. Namun, kelemahan fatal berupa ketergantungan layanan pada infrastruktur fisik konvensional dan ketiadaan cadangan data digital menyebabkan sistem lumpuh saat diterjang banjir. Di sisi eksternal, dukungan penuh Pemerintah Pusat melalui instruksi Presiden dan potensi bantuan filantropi (seperti teknologi air bersih dari ITB) menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, ancaman serius muncul dari hancurnya 30,7 ribu hektare tambak rakyat yang melumpuhkan ekonomi keluarga dan memicu risiko putus sekolah serta gizi buruk.

Berdasarkan interaksi faktor-faktor tersebut dalam matriks TOWS, dirumuskan strategi "Transformasi Ekosistem Layanan Digital dan Sosial". Strategi ini menggunakan kekuatan fiskal daerah (S1) dan dukungan pusat (O1) untuk mengatasi kelemahan ketergantungan fisik (W2) melalui pembangunan sistem layanan berbasis *cloud*. Selain itu, kebijakan ini mengalihkan anggaran rutin menuju "Basiswa Transisi Resiliensi" untuk memitigasi ancaman ekonomi keluarga (T2) pascabencana. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan SDM tetap berjalan melampaui hambatan geografis dan infrastruktur yang rusak, sekaligus memberikan jaring pengaman langsung bagi kelompok masyarakat paling rentan.

ALTERNATIF PEMILIHAN KEBIJAKAN

Dalam upaya mendobrak stagnasi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Tamiang yang diperburuk oleh dampak bencana banjir bandang, diperlukan identifikasi solusi yang tidak hanya bersifat reaktif namun juga transformatif. Berdasarkan analisis TOWS yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini merumuskan tiga alternatif kebijakan utama yang memiliki pendekatan berbeda dalam merespons *problem statement*. Alternatif pertama adalah Reformasi Tata Kelola Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja yang bersifat sistemik dan *top-down*. Kebijakan ini menekankan pada perubahan "aturan main" dalam siklus birokrasi, di mana alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan secara ketat diikat pada pencapaian *outcome* nyata, bukan sekadar pemenuhan administratif sebagaimana yang selama ini terjadi. Pendekatan ini bertujuan membangun ekosistem kebijakan yang kredibel, namun menuntut kesiapan kapasitas digital dan data yang mumpuni di tengah kondisi infrastruktur yang saat ini terdisrupsi.

Alternatif kedua adalah Penguatan Kapasitas Implementasi dan Intervensi Program Terfokus yang bersifat lebih pragmatis dan *bottom-up*. Kebijakan ini berfokus pada pembangunan "pulau-pulau keberhasilan" melalui program percontohan di tingkat sekolah dan puskesmas yang paling terdampak bencana. Fokus utamanya adalah memberikan pendampingan teknis langsung kepada garda depan pelayanan publik guna memulihkan kepercayaan masyarakat dan membuktikan efektivitas intervensi sebelum dilakukan replikasi luas. Sedangkan alternatif ketiga adalah Peningkatan Akuntabilitas Politik dan Pengawasan Partisipatif yang mengandalkan peran eksternal untuk menekan potensi intervensi non-teknis dalam penganggaran pembangunan SDM.

Penilaian Komparatif Menggunakan Metode William Dunn

Untuk menentukan prioritas kebijakan yang paling layak diimplementasikan, ketiga alternatif tersebut dievaluasi menggunakan enam kriteria analisis kebijakan menurut William Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelayakan teknis. Hasil penilaian kuantitatif menunjukkan bahwa Alternatif 2 memperoleh skor tertinggi (4,50), mengungguli Alternatif 1 (3,60) dan Alternatif 3 (3,80). Skor sempurna pada aspek efektivitas diberikan kepada Alternatif 2 karena kemampuannya menciptakan hasil nyata di lapangan dalam waktu relatif singkat, terutama dalam menangani risiko putus sekolah melalui program "Beasiswa Transisi Resiliensi" bagi keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya 30,7 ribu hektare tambak.

Dari sisi efisiensi, Alternatif 2 dipandang sangat unggul karena memfokuskan sumber daya yang terbatas pada intervensi yang telah teruji secara teknis, sehingga meminimalisir risiko pemborosan anggaran dalam skala besar. Sementara itu, Alternatif 1 meskipun memiliki dampak paling transformatif, dinilai memiliki kelayakan politik yang rendah karena berpotensi menghadapi resistensi birokrasi yang tinggi akibat perombakan zona nyaman dalam pengelolaan anggaran inkremental. Secara teknis, kelayakan Alternatif 2 didukung oleh fakta bahwa program pendampingan dan *pilot project* lebih mudah diimplementasikan tanpa harus menunggu pemulihan total 320 jembatan dan akses jalan yang saat ini masih terhambat.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa kegagalan akselerasi mutu SDM di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan manifestasi dari paradoks tata kelola yang lebih mengutamakan kepatuhan administratif dibandingkan orientasi pada hasil (*outcome*). Kondisi ini mencapai titik kritis pasca bencana banjir bandang November 2025 yang tidak hanya melumpuhkan 32 sarana perkantoran tetapi juga menciptakan ancaman nyata bagi keberlanjutan pendidikan 439 sekolah yang terdampak. Akar masalah utama ditemukan pada rendahnya kualitas perencanaan substantif yang belum mengintegrasikan manajemen risiko bencana ke dalam pelayanan dasar, sehingga alokasi anggaran yang besar tidak secara otomatis menjadi perisai bagi penurunan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan evaluasi sistematis menggunakan metode William Dunn, strategi yang paling realistis dan berdaya ungkit tinggi saat ini adalah penguatan kapasitas implementasi melalui intervensi terfokus. Pendekatan ini memungkinkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menciptakan bukti keberhasilan (*proof of concept*) di tengah keterbatasan fiskal dan infrastruktur, sekaligus membangun fondasi bagi reformasi sistemik yang lebih luas di masa depan.

Rekomendasi utama yang diajukan adalah penerbitan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Akselerasi Kinerja Pelayanan Dasar dan Implementasi Program Percontohan Berbasis Hasil (*Outcome-Based Pilot Program*). Implementasi kebijakan akselerasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang resilien di Kabupaten Aceh Tamiang dirancang melalui peta jalan strategis berdurasi lima tahun, yang dimulai dari fase pemulihan darurat hingga fase pelebagaan sistemik. Pada **Fase Pertama (2026)**, fokus utama diarahkan pada

pembangunan fondasi regulasi dan jaring pengaman sosial melalui penerbitan Peraturan Bupati mengenai manajemen resiliensi SDM. Langkah konkret ini melibatkan kolaborasi antara Bupati, Bappeda, dan Dinas Pendidikan untuk menyalurkan beasiswa transisi bagi siswa dari keluarga petambak yang kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan 30,7 ribu hektare lahan tambak. Indikator keberhasilan pada tahap ini adalah tercapainya target nol angka putus sekolah pada kelompok masyarakat terdampak ekonomi bencana.

Memasuki **Fase Kedua (2027)**, kebijakan bergeser pada integrasi infrastruktur digital yang dipimpin oleh Dinas Kominfo melalui migrasi seluruh data layanan dasar ke sistem *cloud computing*. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa layanan administrasi pendidikan dan kesehatan tetap beroperasi secara penuh meskipun terjadi disrupsi fisik pada kantor pemerintahan sebagaimana yang dialami 32 unit kantor pada bencana sebelumnya. Pada **Fase Ketiga (2028)**, akselerasi kualitas dilakukan melalui sertifikasi kompetensi resiliensi bagi tenaga medis dan pendidik oleh BKPSDM untuk menjamin peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada sektor layanan dasar.

Fase penguatan infrastruktur fisik secara permanen baru dilaksanakan pada **Fase Keempat (2029)** melalui standarisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) oleh Dinas PUPR dan sektor swasta, memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas mitigasi mandiri yang fungsional. Peta jalan ini diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun kelima (2030) melalui tahap keberlanjutan, di mana model resiliensi SDM direplikasi ke seluruh sektor pembangunan daerah. Keberhasilan akhir dari rangkaian kebijakan ini diukur melalui peningkatan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) minimal 9,45 tahun serta posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang melampaui rata-rata Provinsi Aceh.

Sebagai kesimpulan substantif, stagnasi kualitas SDM di Aceh Tamiang hanya dapat diputus melalui keberanian politik untuk melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada resiliensi. Kegagalan mencapai target RLS dan AKB di masa lalu merupakan pengingat bahwa pola kerja *business as usual* tidak lagi relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin volatil. Transformasi dari kepatuhan prosedur menuju kepatuhan pada hasil nyata harus menjadi ruh baru dalam setiap dokumen perencanaan daerah mendatang.

Rekomendasi operasional yang mendesak adalah segera ditetapkannya regulasi mengenai "Jaring Pengaman Resiliensi SDM" yang mencakup beasiswa transisi bagi siswa terdampak dan pengaktifan satuan tugas kesehatan mental di tiap kecamatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus memprioritaskan anggaran 2026 untuk rekonstruksi infrastruktur konektivitas yang mendukung aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah terisolir. Langkah-langkah konkrit ini akan menjadi pembuktian bahwa Aceh Tamiang mampu bangkit lebih kuat dari puing-puing bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang. (2022). Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022-2026. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 (Audited). Perwakilan BPK Provinsi Aceh.
- Pusbindiklatren Bappenas. (2025). Panduan Penulisan Makalah Kebijakan (Policy Paper) bagi Jabatan Fungsional Perencana. Kementerian PPN/Bappenas.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sekretariat Negara.
- Abidin, Z., & Wardani, R. K. (2023). Disaster resilience in education: A study of school recovery post-hydrometeorological disasters. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 17(2), 245-254. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i2.20651> (Scopus)
- Adiyoso, W. (2021). Manajemen risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 12-28. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.156> (Sinta 2)
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Pratama, A. R., & Askim, M. (2022). The challenges of implementing evidence-based policymaking in the health sector. *Health Policy and Planning*, 37(8), 982-990. <https://doi.org/10.1093/heapol/czac051> (Scopus)
- Rahayu, S., & Ananda, C. F. (2023). Tantangan implementasi kebijakan berbasis bukti dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(2), 179-194. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i2.1009> (Sinta 2)
- Sari, D. P., & Abdullah, S. (2021). Efektivitas alokasi dana otonomi khusus untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Aceh. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(1), 45-58. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1844> (Sinta 2)
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Fahlevi, R., & Handayani, T. (2021). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 89-108. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.21002/jaki.2021.05>
- Hafiz, M., & Pratiwi, A. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(2), 245-257. <https://www.google.com/search?q=http://www.jim.unsyiah.ac.id/eka/article/view/20653>
- Kusumawati, A., & Wulandari, D. (2023). From planning to impact: Challenges of outcome-based monitoring and evaluation in Indonesian local government. *Journal of Public Administration and Governance*, 13(2), 112-128. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.5296/jpag.v13i2.20851>
- Pratama, A. R., & Askim, M. (2022). The challenges of implementing evidence-based policymaking in the health sector: a case study of stunting prevention in

- Indonesia. Health Policy and Planning, 37(8), 982-990.
<https://doi.org/10.1093/heapol/czac051>
- Rahayu, S., & Ananda, C. F. (2023). Tantangan Implementasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Daerah. Jurnal Borneo Administrator, 19(2), 179-194.
<https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.24258/jba.v19i2.1009>
- Sari, D. P., & Abdullah, S. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Aceh. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6(1), 45-58.
<https://www.google.com/search?q=https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/1844>
- Action Humanity. (2026). Laporan Program Dukungan Psikososial dan Bantuan Pangan Pascabencana Aceh Tamiang. Republika Online.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Aceh Tamiang.
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2026). Analisis Kerusakan Bangunan Akibat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tamiang 2025. Webinar Nasional BRIN.
- BBC News Indonesia. (2026, Januari 24). Banjir: Solusi krisis air bersih di Aceh Tamiang melalui teknologi IPA Mobile.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g3q2vvx540>
- BNPB. (2025). Update Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Aceh Tamiang Desember 2025. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. (2026). Laporan Kerusakan Tambak Rakyat Akibat Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Pemerintah Provinsi Aceh.
- Independen Media. (2026, Februari 16). Trauma kolektif warga Aceh Tamiang pascabencana banjir bandang.
<https://www.independenmedia.id/daerah/27616/tiga-bulan-pasca-banjir>
- MetroTV News. (2026, Januari 29). Kolaborasi Polri dan Akademisi dalam Penyaluran Bantuan Pendidikan Terdampak Banjir Aceh.
<https://www.metrotvnews.com/play/b1oCODIR-polres-aceh-tamiang>
- Republika Online. (2026, Februari 05). Pasien Hemodialisis RSUD Muda Sedia Kembali Dapatkan Layanan Pascabanjir.
<https://news.republika.co.id/berita/t9e72e370/pascabanjir-layanan-cuci-darah>